

## ABSTRAK

### **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BISNIS DIGITAL (*E-COMMERCE*) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Laila Rama Juliana Nasution**

Tingginya nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia, selain memberikan surplus ekonomi yang sangat tinggi dan mempercepat transformasi ekonomi digital tanah air, juga menimbulkan beberapa potensi masalah yang perlu diantisipasi serta ditangani dengan baik. Banyaknya jumlah pelaku usaha yang turut bekerja dalam sistem *e-commerce* menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin ketat dan kompetitif.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum bisnis digital (*E-Commerce*) dalam persaingan sehat di Indonesia, peran KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (*E-Commerce*) dan hambatan dan upaya dalam menciptakan persaingan usaha sehat pada bisnis digital (*E-Commerce*).

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum bisnis digital (*E-Commerce*) dalam persaingan sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Peran KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (*E-Commerce*) adalah mengoptimalkan fungsi dari Peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha dan melakukan pengawasan dan kegiatan pertimbangan menentukan kebijakan persaingan usaha dengan pemerintahan. Hambatan dalam menciptakan persaingan usaha sehat pada bisnis digital (*E-Commerce*) adalah kompleksitas model bisnis dalam Ecommerce yang dimana UU di Indonesia yang mengatur segala sesuatu tentang persaingan usaha belum menetapkan aturan yang spesifik di usaha berbasis digital dan upaya yang harus dilakukan dengan menerapkan strategi dan praktik bisnis yang mendorong persaingan yang adil, penegakan hukum yang efektif, transparansi dalam proses bisnis, dan pembentukan budaya bisnis yang etis perlu diterapkan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Penegakan Hukum, Bisnis Digital, KPPU, Praktek Monopoli, Persaingan usaha Sehat**

## **ABSTRACT**

### **SUPERVISION AND LAW ENFORCEMENT OF DIGITAL BUSINESSES (E-COMMERCE) BY THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (KPPU) BASED ON LAW NUMBER 5 OF 1999 PROHIBITING MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION**

**Laila Rama Juliana Nasution**

*The high value of e-commerce transactions in Indonesia, apart from providing a very high economic surplus and accelerating the country's digital economic transformation, also raises several potential problems that need to be anticipated and handled well. The large number of business actors working in the e-commerce system causes business competition to become increasingly tight and competitive.*

*The problem in this thesis research is how the legal regulation of digital business (E-Commerce) is regulated in healthy competition in Indonesia, the role of the KPPU in supervising and enforcing the law on digital business (E-Commerce) and the obstacles and efforts in creating healthy business competition in digital business. (E-Commerce).*

*The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.*

*The conclusion in this thesis research is that the legal regulation of digital business (E-Commerce) in healthy competition in Indonesia is regulated in Law Number 5 of 1999 prohibiting monopolistic practices and unhealthy business competition and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Technology Electronic. The KPPU's role in supervising and enforcing the law on digital business (E-Commerce) is to optimize the function of laws and regulations regarding business competition and carry out supervision and consideration activities in determining business competition policies with the government. The obstacle in creating healthy business competition in digital business (E-Commerce) is the complexity of the business model in E-commerce, where the Law in Indonesia which regulates everything about business competition has not yet established specific rules for digital-based businesses and efforts must be made to implement strategies and business practices that encourage fair competition, effective law enforcement, transparency in business processes, and the establishment of an ethical business culture need to be implemented.*

**Keywords : Supervision, Law Enforcement, Digital Business, KPPU, Monopoly Practices, Healthy Business Competition.**